

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Pengarah

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

Ketua

Dr. Syofyan Hadi, S.H, M.H.

Wakil Ketua

Sulton Fikri, S.I.P., S.H., M.H.

Acara

Dr. Erny Herlin Setyorini, S>H., M.H.

Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti, S.H., M.H.

I Gde Sandy Satria, S.H., M.H.

Editor

Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

Mega Dewi Ambarwati, S.H., M.H.

Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.

Reviewer

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.

Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

Dipo W Haryono, S.H., M.Hum.

Juli Fatkhun Nikmah, S.Psi., M.Psi.

Shofi Nurdini Annisa Eka Sari, S.Psi., M.Psi.

PRAKATA

Hal menarik dalam penerbitan Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus tetap ada dalam keadaan apapun. Hal ini selaras dengan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang menjadi Kampus Merah Putih sehingga tindakan dalam tri darma pendidikan tinggi mengacu pada Pancasila. Perlu diketahui bahwa sistem hukum nasional saat ini cenderung menormatifkan yang tidak tertulis sehingga muncul degradasi pemikiran. Padahal mengacu aliran hukum alam bahwa yang tidak tertulislah utamanya sehingga dalam pembentukan yang tertulis bersumber dari tidak tertulis.

Sistem hukum nasional haruslah menjadi penciri Indonesia sehingga adanya kebaruan dalam hasil akhirnya. Salah satu contohnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membutuhkan waktu lama untuk menjadi Indonesia. Semoga prosiding ini menjadi tawaran jalan keluar bagi pembelajar ilmu hukum. Lagipula sepeeti kata Salomo “Maka tidaklah tersembunyi siapa saja yang fasik bicaranya, dan tidak dilewatkan keadilan penghukum”.

Januari 2024

Editor